

PENGARUH KINERJA DAN PENGAWASAN APARATUR PEMERINTAH DESA TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN DESA MONTONG BETOK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

M. Amin¹

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), NTB, Indonesia

[1aminlombok77@gmail.com](mailto:aminlombok77@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to empirically analyze the influence of the performance of village government officials and BPD supervision on village financial transparency. The data source in this study uses primary data by distributing questionnaires to Montong Betok Village, Montong Gading District, East Lombok Regency. The test equipment used in this study consisted of a normality test, a multicollinearity test, a heteroskedasticity test, a t-test and fabel hypothesis test. The results of this study indicate that the first hypothesis of the performance variable of the village government apparatus has a positive and significant effect on village financial transparency in Montong Betok Village, Montong Gading District, East Lombok Regency. The second hypothesis of BPD supervision variables has a positive and significant effect on village financial transparency in Montong Betok Village, Montong Gading District, East Lombok Regency

Keywords: *Performance of Village Government Apparatus, BPD Supervision, Transparency*

PENDAHULUAN

Edward III (dalam Nugroho, 2014:64) bahwa ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap menjadi faktor untuk *carry out* kebijakan publik yang efektif. Pada sisi lain John P. (1993:45) berpendapat bahwa lemahnya sumberdaya menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya.

Kinerja aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan sekaligus penyelenggara pemerintahan desa yang mencakup kemampuan dan sarana prasarana merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk di teliti.

Karena diketahui bahwa faktor kemampuan sumber daya manusia (aparatur) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Selain aparatur desa terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Kedudukannya dalam struktur pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam melaksanakan fungsinya Aparatur Desa termasuk BPD masih banyak yang belum memahami tugas

dan fungsinya masing-masing, baik dalam teknik mengawasi anggaran . Akibatnya banyak anggaran yang belum direalisasikan dan juga pada proses pengauditan masih banyak dana hasil temuan auditor atau inspektorat dan pemeriksa dari unsur BPKP maupun BPK.

Pada sisi lain pemerintah desa dituntut oleh PEMDA untuk terus melakukan keterbukaan keuangan agar masyarakat tau dengan kondisi keuangan pemerintah desa, termasuk pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang syah serta program pembangunan dan pemberdayaan desa. Oleh karenanya perlu dilakukan kajian dan penelitian yang terkait dengan sumberdaya manusia desa serta informasi publik terkait kebijakan penggunaan Dana Desa terutama berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan aplikasi keuangan desa.

Penelitian Nyoman Judarmita Ni Luh Supadmi (2017) Hasil penelitian yang di temukan adalah Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sistem pelaporan berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana, Kinerja aparatur berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jaitun (2013) menemukan bahwa kerja sama, kedisiplinan, kreativitas, dan tanggung jawab berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, Adha (2016) menemukan bahwa kinerja kepala desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo di Kabupaten Rokan Hulu dipengaruhi

secara positif oleh pengawasan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Hasil penelitian diatas sejalan dengan teori dalam penelitian ini yaitu apabila pemerintah desa mampu menerapkan kinerja aparatur pemerintah maka tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga akan membentuk *good governance*.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah pada penelitian Nyoman Judarmita Ni Luh Supadmi dengan variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kinerja aparatur sebagai variabel indeviden dan akuntabilitas sebagai variabel devenden sedangkan pada penelitian ini adalah pada variabel indeviden Sistem Pelaporan, Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa, Dan Kinerja aparatur sedangkan pada variabel devenden adalah transparansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif , bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013:236). Pendekatannya menggunakan kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistic (Indriantoro dan Supomo, 2014: 12). Lokasi penelitian di Desa Montong

Betok Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur.

Pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi atau biasa disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi dapat dilakukan dengan test kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara (Arikunto,2010:156). Penelitian ini menggunakan metode angket yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan serta pernyataan-pernyataan kepada kepala desa, sekretaris desa,

bendahara desa dan anggota BPD, sekaligus dengan jawabanya dengan tujuan peneliti mendapatkan jawaban dan pendapat yang diinginkan peneliti.

Pengukuran skala atas jawaban responden menggunakan skala *likert* untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban dari setiap butir pernyataan tingkatan dari yang sangat positif sampai yang sangat negatif, yang berupa kata-kata dengan skor dari setiap pilihan jawaban atas pernyataan sebagai berikut :

Tabel 1
Nilai jawaban dari pembobotan skala likert

NO	Jawaban	NilaiPositif	NilaiNegatif
1.	Sangat setuju	5	1
2.	Setuju	4	2
3.	Ragu-ragu	3	3
4.	Tidak setuju	2	4
5.	Sangat tidak setuju	1	5

Sumber: data diolah tahun 2019

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya pengaruh kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dengan menggunakan rumus regresi linear berganda seperti yang dikutip oleh Sugiyono (2006:261), yaitu : $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

Di mana :

Y : Transparansi

X1 : kinerja aparatur pemerintah desa

X2 : pengawasan BPD

a : Konstanta

b : Koefisien Korelasi

e : Error term

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing

variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel . Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ artinya variabel bebas secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ berarti bahwa variabel bebas secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika t hitung $< t$ tabel, artinya variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Jika t hitung $> t$ tabel, artinya variabel bebas secara individual

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Uji F dilakukan untuk melihat apakah model yang dianalisis memiliki tingkat kelayakan model yang tinggi yaitu variabel-variabel yang digunakan model mampu untuk menjelaskan fenomena yang dianalisis (Ferdinand, 2014, p. 239). Pengujian kelayakan model penelitian ini ialah menggunakan uji Anova (uji F) dimana dengan menggunakan uji ini akan diketahui apakah variabel independen dapat

memprediksi variabel dependen dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner pada responden 15 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kepala Dusun (Kadus) penyebaran kuesioner dilakukan dengan kurun waktu kurang lebih 3 minggu kepada aparatur pemerintah desa yang menjadi obyek penelitian.

Tabel 2
Tingkat Pengembalian Kuesioner Menurut Persentase (%)

Keterangan	Responden	
	Jumlah	%
Kuesioner yang disebarkan	15	100%
Kuesioner yang kembali	15	100%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%
Kuesioner yang dapat diolah	15	100%

Sumber: data primer yang diolah tahun 2019

Jumlah responden (N) dalam penelitian ini sebanyak 15 responden, maka nilai diperoleh r_{tabel} sebesar 0,0,514. Hasil dari r_{tabel} tersebut didapatkan dari tabel r. Angka r_{tabel} tersebut kemudian dibandingkan dengan r hitung yang telah diketahui dari nilai output SPSS tiap variabel penelitian. Berdasarkan hasil uji validitas semua

item pertanyaan dari setiap variabel penelitian ini adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari r_{hitung} masing – masing lebih besar dari nilai r_{tabel}

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Cronbatch Alpha* (α). Suatu item kuesioner dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbatch Alpha* > 0,60

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbatch Alpha</i>	Keterangan
Kinerja aparatur pemerintah	0,850	Reliabel
Pengawasan BPD	0,576	Reliabel
Transparansi	0,610	Reliabel

Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan tabel 3 bahwa nilai *Cronbatch Alpha* untuk masing– masing

variabel pada penelitian ini adalah untuk kinerja aparatur pemerintah 0,850,

pengawasan BPD 0,576, transparansi 0,610, hal ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada penelitian ini dapat dikatakan reliable.

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi

variabel pengganggu (residual) terdistribusi secara normal, uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan model pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Data

		kinerja aparatur pemerintah desa	pengawasan BPD	transparansi
N		15	15	15
Normal Parameters ^a	Mean	33.60	27.27	33.80
	Std. Deviation	4.171	4.114	5.493
Most Extreme Differences	Absolute	.205	.154	.120
	Positive	.110	.154	.095
	Negative	-.205	-.151	-.120
Kolmogorov-Smirnov Z		.793	.597	.464
Asymp. Sig. (2-tailed)		.555	.868	.982

Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4 bahwa hasil uji normalitas menunjukkan nilai variabel kinerja aparatur pemerintah desa sebesar 0,0555 lebih besar dari 0,05, nilai variabel pengawasan BPD sebesar 0,868 lebih besar dari 0,05, dan nilai variabel transparansi sebesar 0,982 lebih besar dari 0,05. Jadi data semua variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidak samaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya selalu sama, disebut homoskedastisitas dan jika variance residual berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya disebut heteroskedastisitas.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	T	Sig.
1 (Constant)	1.238	4.732	.262	.798
kinerja aparatur pemerintah desa	.010	.156	.066	.948
pengawasan BPD	.029	.158	.183	.858

Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan tabel 5 hasil uji heteroskedastitas menggunakan uji glejser menunjukkan nilai sig variabel kinerja aparatur pemerintah sebesar 0,948 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur pemerintah dalam penelitian tidak terjadi masalah heteroskedastitas. Maka nilai sig pengawasan BPD sebesar 0,858 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan BPD dalam penelitian tidak terjadi masalah heteroskedastitas.

Penelitian ini meregresikan variabel independen yaitu, kinerja aparatur pemerintah desa dan pengawasan BPD, kejelasan sasaran anggaran, dan prosocial behavior pada variabel dependen yaitu transparansi, analisis regresi menghasilkan koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh sebab akibat antar variabel bebas dan terikat.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-4.418	7.715	
kinerja aparatur pemerintah desa	.671	.255	.510
pengawasan BPD	.575	.258	.430

Sumber: data diolah 2019

$$Y_1 = 32.439 + -448X_1 + 428 X_2 + e$$

Jika diasumsikan nilai kinerja aparatur pemerintah 0,510 dan pengawasan BPD 0,430 adalah konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel transparansi -4,418.

Variabel kinerja aparatur pemerintah sebesar 0,671, artinya apabila kinerja aparatur pemerintah ditingkatkan satu persen maka transparansi keuangan desa mengalami peningkatan juga sebesar 0,671. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan searah antara kinerja aparatur pemerintah desa dengan transparansi keuangan desa. Variabel pengawasan

BPD sebesar 0,575 artinya apabila pengawasan BPD ditingkatkan satu persen maka transparansi keuangan desa mengalami kenaikan sebesar 0,575 Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan searah antara pengawasan BPD dengan transparansi keuangan desa yang sangat baik.

Nilai koefisien R² bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependent atau untuk menunjukkan seberapa besar model regresi mampu menjelaskan variabelitas variabel dependent.

Tabel 7
Hasil Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.823 ^a	.678	.624	3.367

Sumber: data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4 nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,678, nilai 0,678 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R yaitu $0,823 \times 0,823 = 0,678$. Besarnya angka koefisien determinasi

0,678 sama dengan 67,8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa kinerja aparatur pemerintah desa, pengawasan BPD berpengaruh terhadap transparansi keuangan desa sebesar 67,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients			
		B	Std. Error	T	Sig.
1	(Constant)	-4.418	7.715	-.573	.577
	kinerja aparatur pemerintah desa	.671	.255	2.636	.022
	pengawasan BPD	.575	.258	2.226	.046

Sumber: Data Diolah 2019

Kinerja aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di Desa Montok Betok Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok timur, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, menunjukkan bahwa hipotesis diterima dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,636 lebih besar dari 2,160 dengan koefisien jalur 0,673 dengan arah positif, sedangkan nilai sig 0,022 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji ini membuktikan bahwa variabel kinerja aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di Montok Betok

Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok timur. Artinya semakin bagus kinerja aparatur pemerintah desa akan menyebabkan transparansi keuangan desa semakin baik.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan teori yaitu apabila pemerintah desa mampu menerapkan kinerja aparatur pemerintah maka tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga akan membentuk *good governance*.

Penelitian ini sejalan dengan I Nyoman Judarmita Ni Luh Supadmi (2017) menunjukkan bahwa 1) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sistem pelaporan berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana, Kinerja aparatur berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari sisi literatur, penelitian terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan desa masih sangat terbatas dan belum menemukan determinan yang sudah konsisten teruji.

Pengawasan BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok timur, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, menunjukkan bahwa hipotesis diterima dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,226 lebih besar dari 2,160 dengan koefisien jalur 0,575 dengan arah positif, sedangkan nilai sig 0,046 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji ini membuktikan bahwa variabel Pengawasan BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa di Desa Montong Betok Kecamatan Montong

Gading Kabupaten Lombok timur. Artinya semakin system pengawasan anggaran yang dilakukan BPD akan menyebabkan transparansi keuangan desa semakin baik di Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Penelitian Lutfhi Nur Fahri (2017) menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa.

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan sehingga BPD memiliki peran yang penting bagi berjalannya Pemerintahan Desa. Peran BPD menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* bersama dengan 78 unsure pemerintahan yang lainnya.

Tabel 9
Hasil Uji Kelayakan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	286.378	2	143.189	12.632	.001 ^a
	Residual	136.022	12	11.335		
	Total	422.400	14			

Sumber: Data Diolah 2019

Dari tabel 9 menunjukkan bahwa nilai sig untuk hasil uji kelayakan model sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 artinya variabel independen kinerja aparatur pemerintah, kejelasan pengawasan BPD mampu memprediksi variabel dependen transparansi. Begitu juga dengan nilai f hitung lebih besar dengan nilai f tabel $12,632 > 3,89$ artinya variabel independen mampu memprediksi variabel dependen.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan kinerja aparatur dan pengawasan BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa. Artinya potensi para aparatur pemerintah desa menjadi ujung tombak agar terciptanya system pelaporan yang baik dan transparansi serta mudah diakses. Pengawasan BPD terhadap anggaran sangat memberikan dampak positif terhadap terciptanya transparansi keuangan desa.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas dapat memberikan kontribusi sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya guna mendapatkan informasi yang lebih luas dalam mengkaji fenomena perilaku aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ramdhani, Dini Turipanan Alamanda, Hendri Sudrajat. 2012. *Analysis of Consumer Attitude Using Fishbein Multi-Attributes Approach*. International Journal Of Basic And Applied

Science Vol. 1 No. 1. E-ISSN 2301-8038.

Adha Inapty, M., dan Martiningsih, R. R., 2016, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD di Pemprov NTB). *Akuntabilitas*, 9(1).

Ahmad S Ruky. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Alam, Iskandar Ali (2016). *The Impact of Economic Structure Change on The Local own Source Revenue and Its Effect Towards The Regional Income Improvement. The Third International Confrence on Law, Business and Government*. ISSN: 2339-1650

Anggraini, Dina dan Fitrah Mulyani. 2016. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang Periode 2011-2015*. Jurnal Menara Ilmu, Vol. X Jilid 2 No.73.

Anwar perabu mangkunegara 2000 menejemen sumber daya manusia perusahaan cetakan -2 PT. Rosda kariya bandung.

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta

Husein, Umar. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada

Jones, Derek. 2002. *Dasar – dasar obsteri dan gynekologi / Derek*

- Llewellyn-Jones, Edisi 6. Jakarta: Hipokrates.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Meyer, John, P., Allen, Natalie, J. & Smith, Catherina A. 1993. Commitment to Organizational and Occupation: Extention and Test of a Three Component Conceptualization. *Journal Applied Psychology*, Vol. 78. No. 4.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- Rivai, Veithzal, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori Ke Praktik*, Edisi Pertama, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)
- Suyadi Prawirosentono.1999. *Manajemen sumber Daya Manusia (Kebijakan Kinerja Karyawan), Kiat membangun Organisasi Kompetitif menjelang Perdagangan Bebas Dunia*, Edisi Pertama. Yogyakarta; BPFE
- Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Usumadewi, Diah Ayu dan Arif Rahman. (2007). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia*. JAAI. Vol. 11. No.1. Hlm. 67-80. Mardiasmo, (2009). Oton
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta, Rineka Cipta, 1994.
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insani Cendikia, Surabaya